

### BAB III

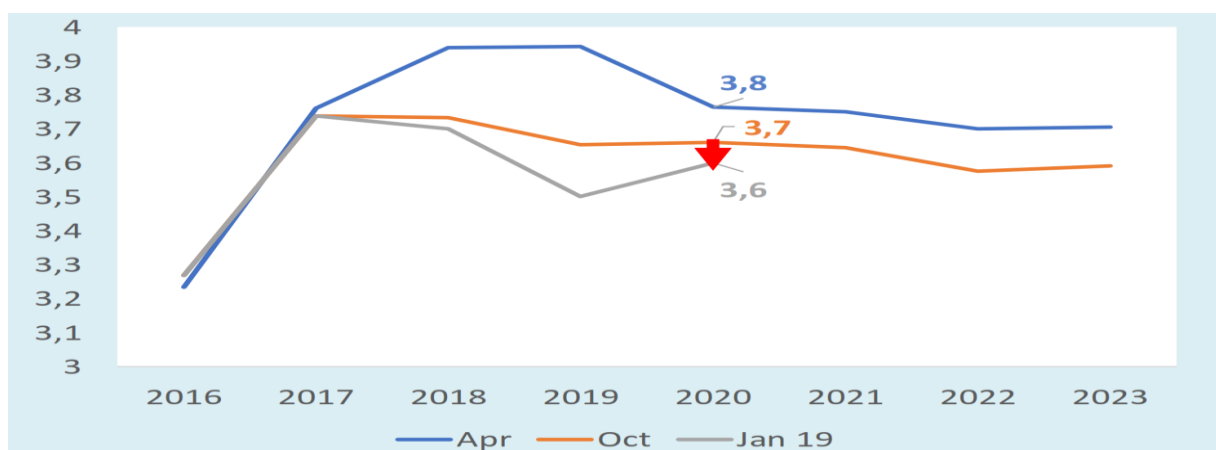
## KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian global, nasional, dan regional ataupun kondisi perekonomian banten sendiri.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Berdasarkan estimasi *World Economic Outlook* (WEO) pada Oktober 2018, Ekspansi Ekonomi Global melemah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 3.7 persen. Kinerja Ekonomi di beberapa negara melambat terutama Eropa dan Asia. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat sebesar 3,5 persen pada 2019 dan 3,6 persen pada tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan berada pada kisaran 1,7 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang pada kisaran 5,0 persen.



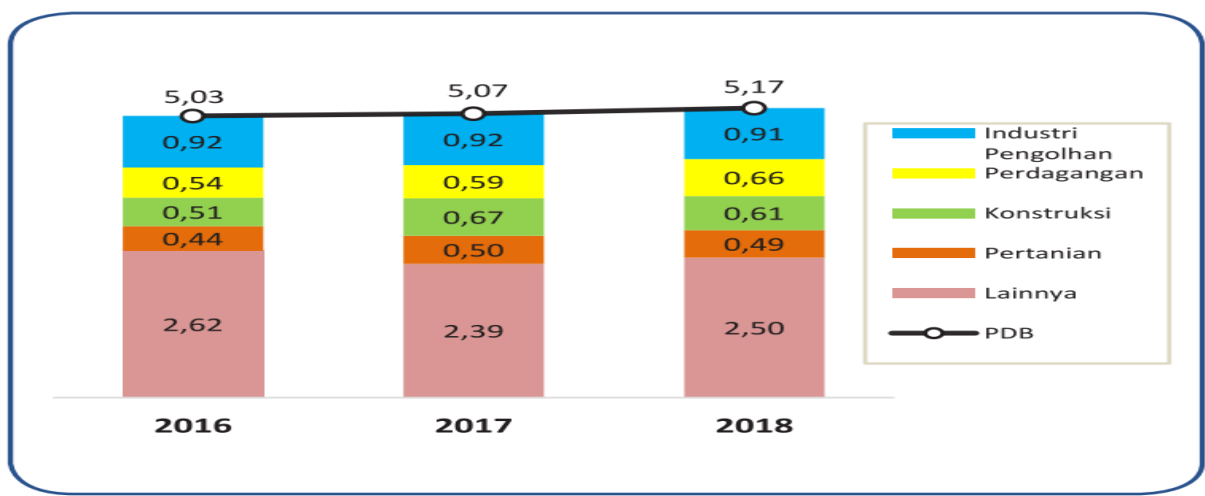
Sumber : WEO, IMF, Januari 2019

Gambar 3.1  
Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2020 diprediksi masih terpengaruh oleh ketegangan perdagangan Amerika-China. Pemeberlakuan standar emisi bahan bakar kendaraan oleh Jerman, kontraksi ekonomi Turki, kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dapat diperparah dengan tingginya utang publik dan swasta. Selain itu penarikan tanpa kesepakatan oleh Inggris dan Uni Eropa berdampak lebih besar dari yang diperkirakan China.

**3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

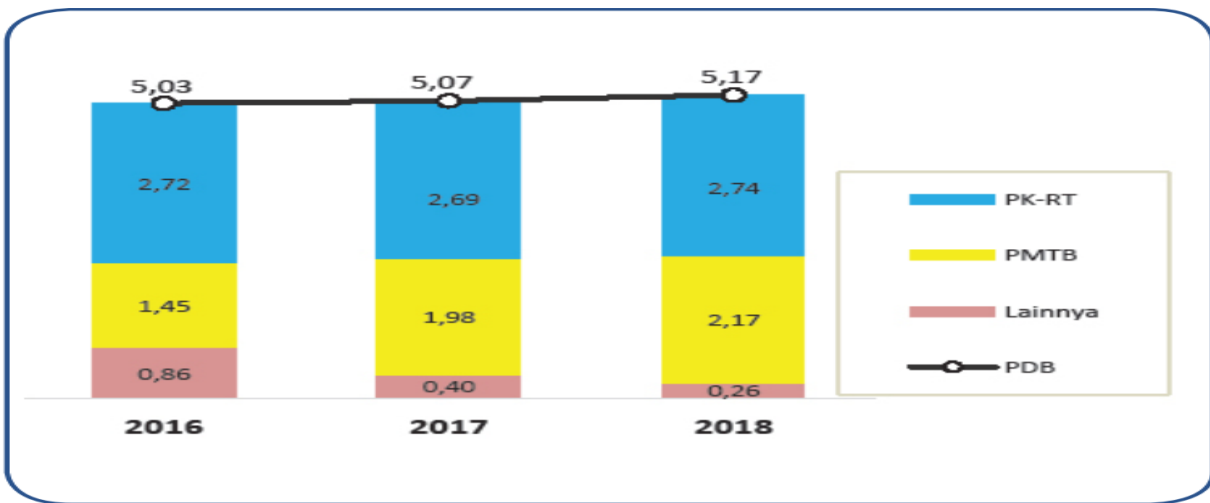
Perekonomian Indonesia digambarkan terus menguat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,03 persen, tahun 2018 sebesar 5,07 persen, dan tahun 2019 sebesar 5,17 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen, diikuti Perdagangan sebesar 0,66 persen, Konstruksi sebesar 0,61 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,50 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,36 persen, lapangan usaha lainnya sebesar 2,14 persen.



Gambar 3.2  
Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2016-2018 (persen)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 5,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen, yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), PK-LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor Barang dan Jasa. Sementara komponen Impor Barang

dan Jasa mengalami peningkatan, namun komponen ini merupakan factor pengurang. Komponen PKLNPRRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 6,67 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,48 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen. Sementara sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,26.



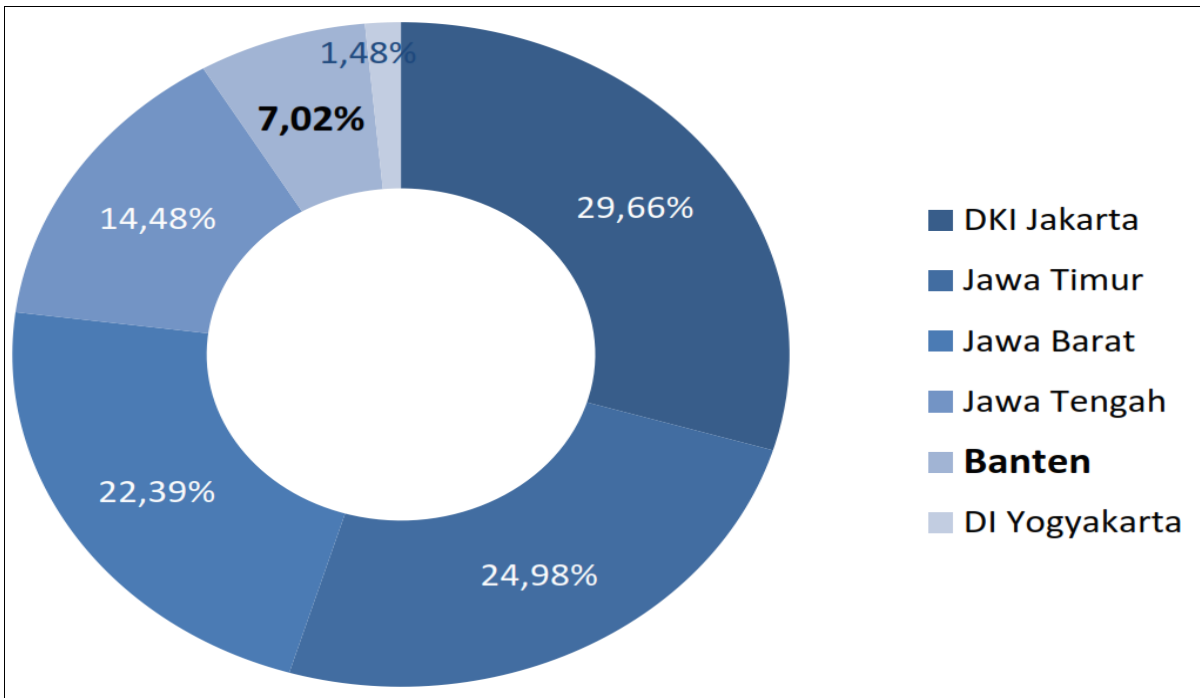
Gambar 3.3  
Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran  
Tahun 2016–2018 (persen)

Selanjutnya pada tahun 2020, Pemerintah Pusat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi indonesia pada kisaran 5,3 - 5,5 persen.

### 3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Banten

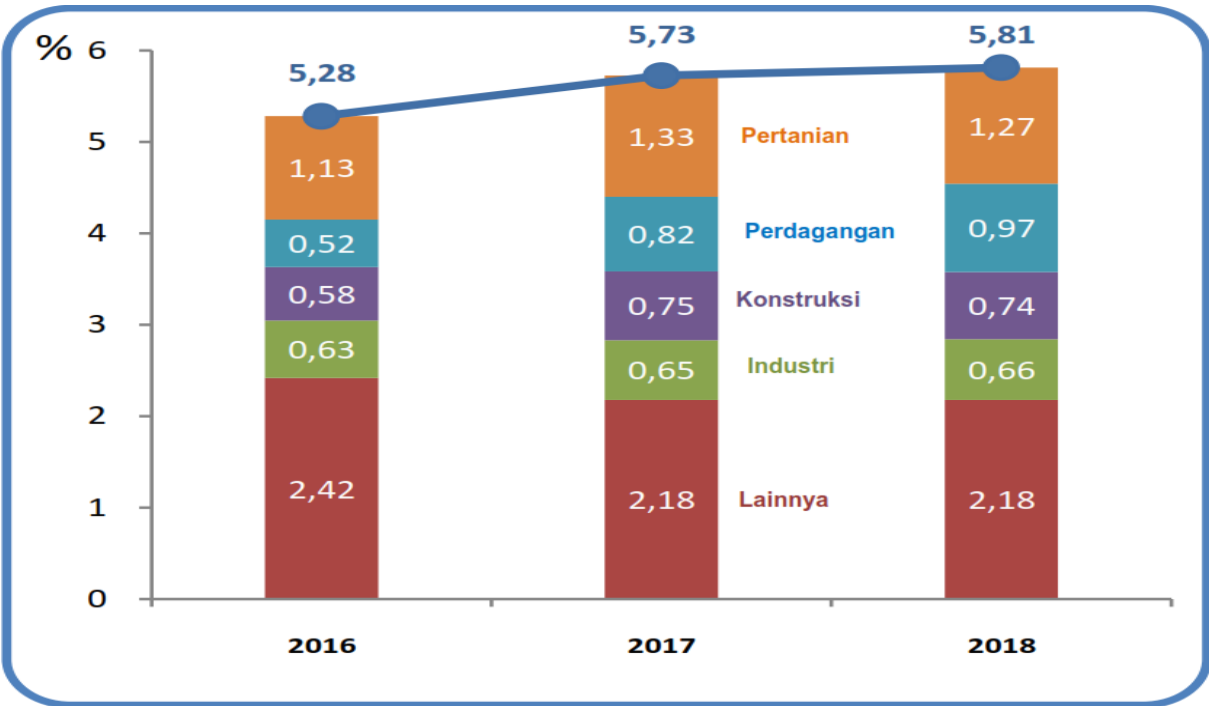
Perekonomian Banten Tahun 2018 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 614,91 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 48,46 juta. Ekonomi Banten tahun 2018 tumbuh 5,81 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,73 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 7,88 persen. Dari sisi Pengeluaran,

pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 7,14 persen. Ekonomi Banten triwulan IV-2018 bila dibandingkan triwulan IV-2017 (yoy) tumbuh 5,98 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,11 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,88 persen. Ekonomi Banten triwulan IV-2018 meningkat sebesar 0,99 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 5,59 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah yang meningkat sebesar 44,01 persen. Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada Tahun 2018 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,66 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,98 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,39 persen, dan Jawa Tengah 14,48 persen. Sementara itu, Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,02 persen.

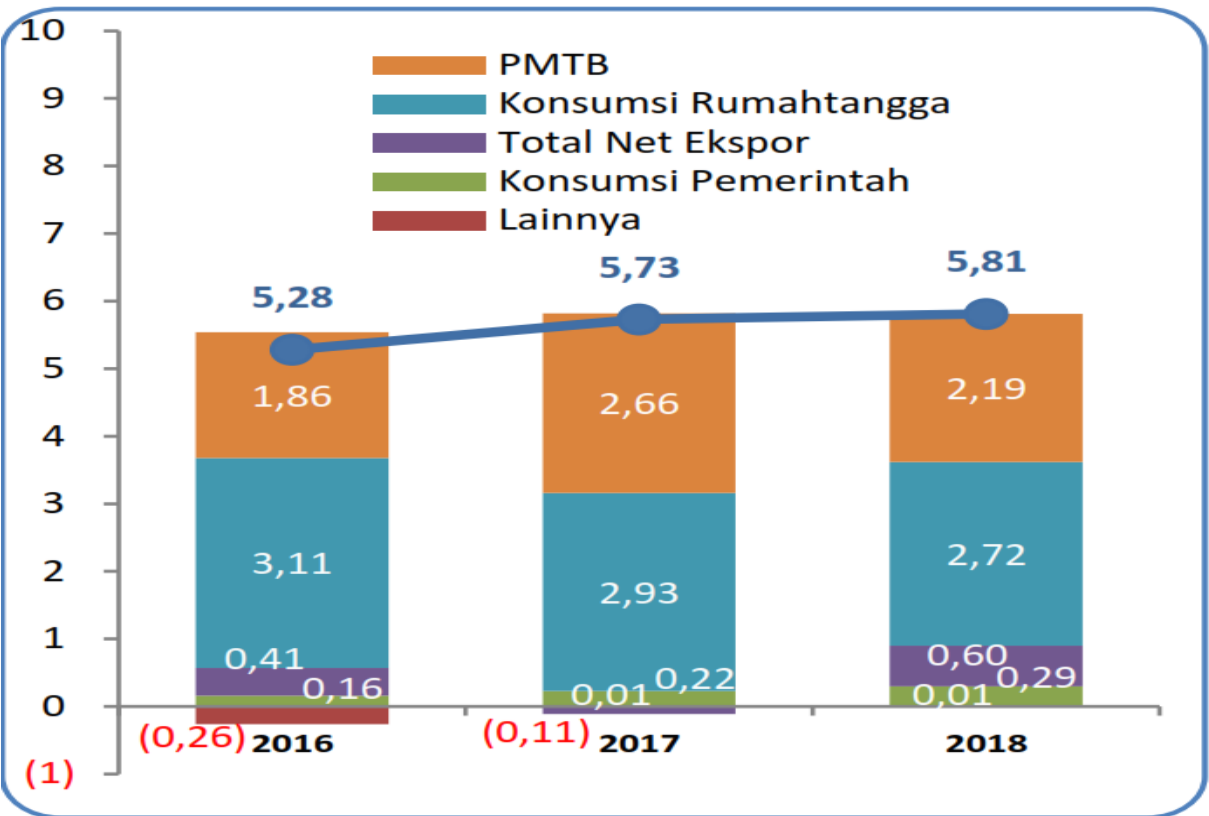


Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 3.4  
Kontribusi PDRB se-Jawa Tahun 2018



Gambar 3.5  
Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2016-2018



Gambar 3.6  
Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Tahun 2016-2018

Pemerintah Pusat menarget pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2020 sebesar 5,11 persen

Tabel 3.1  
PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2018 (Triliun Rp)

| Komponen Pengeluaran                         | Atas Dasar Harga Berlaku |               |               | Atas Dasar Harga Konstan 2010 |               |               |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | 2016                     | 2017          | 2018          | 2016                          | 2017          | 2018          |
| (1)                                          | (2)                      | (3)           | (4)           | (5)                           | (6)           | (7)           |
| 1. Konsumsi Rumah tangga                     | 272,81                   | 294,48        | 321,88        | 224,11                        | 235,49        | 247,89        |
| 2. Konsumsi LNPRT                            | 2,39                     | 2,54          | 2,80          | 1,95                          | 2,01          | 2,15          |
| 3. Konsumsi Pemerintah                       | 22,90                    | 24,60         | 27,26         | 16,21                         | 17,06         | 18,28         |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto             | 153,74                   | 173,09        | 193,23        | 115,88                        | 126,21        | 135,19        |
| 5. Perubahan Inventori                       | 0,05                     | 0,07          | 0,11          | 0,11                          | 0,10          | 0,11          |
| 6. Total Net Ekspor                          | 66,01                    | 68,67         | 69,63         | 29,58                         | 29,17         | 30,26         |
| 6.a. Total Ekspor                            | 377,17                   | 419,43        | 450,07        | 300,74                        | 329,53        | 340,96        |
| 6.b. Total Impor                             | 311,16                   | 350,76        | 380,45        | 271,16                        | 300,36        | 310,70        |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b> | <b>517,90</b>            | <b>563,46</b> | <b>614,91</b> | <b>387,84</b>                 | <b>410,05</b> | <b>433,88</b> |

Tabel 3.2  
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten Menurut  
Pengeluaran Tahun 2016-2018 (Persen)

| Komponen Pengeluaran                         | Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010 |             |             | Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku |               |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|                                              | 2016                                           | 2017        | 2018        | 2016                                | 2017          | 2018          |
| (1)                                          | (2)                                            | (3)         | (4)         | (5)                                 | (6)           | (7)           |
| 1. Konsumsi Rumah tangga                     | 5,39                                           | 5,08        | 5,27        | 52,68                               | 52,26         | 52,35         |
| 2. Konsumsi LNPRT                            | 4,19                                           | 3,28        | 6,77        | 0,46                                | 0,45          | 0,46          |
| 3. Konsumsi Pemerintah                       | 3,85                                           | 5,30        | 7,14        | 4,42                                | 4,37          | 4,43          |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto             | 6,30                                           | 8,91        | 7,12        | 29,69                               | 30,72         | 31,42         |
| 5. Perubahan Inventori                       | (90,46)                                        | (5,64)      | 9,21        | 0,01                                | 0,01          | 0,02          |
| 6. Total Net Ekspor:                         | 5,30                                           | (1,40)      | 3,74        | 12,75                               | 12,19         | 11,32         |
| 6.a. Total Ekspor                            | 2,32                                           | 9,57        | 3,47        | 72,83                               | 74,44         | 73,19         |
| 6.b. Total Impor                             | 2,01                                           | 10,77       | 3,44        | 60,08                               | 62,25         | 61,87         |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b> | <b>5,28</b>                                    | <b>5,73</b> | <b>5,81</b> | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Pengeluaran kapital (PMTB) selama periode tahun 2016 - 2018 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 29-31 persen, dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar Rp115,88 Triliun, Tahun 2017 sebesar Rp126,21 Triliun dan tahun 2018 sebesar Rp135,19 triliun.

Tabel 3.3  
Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2016 – 2020

| Uraian                                 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019<br>(Angka Proyeksi)* | 2020<br>(Angka Proyeksi)* |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 1. PMTB adhk 2010                      | 115,88 | 126,21 | 135,19 | 135,30                    | 135,37                    |
| 2. Pertumbuhan PMTB adhk 2010 (Persen) | 6,3    | 8,91   | 7,12   | 7,44                      | 7,44                      |

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi\*

Sebagaimana proyeksi Bank Indonesia bahwa Perekonomian Provinsi Banten Tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,6 - 6,0% (YoY). Dari Sisi permintaan, pelaksanaan konstruksi beberapa proyek pembangunan infrastruktur terutama proyek nasional serta adanya rencana ekspansi pabrik beberapa pelaku usaha di Provinsi Banten akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dari komponen investasi. Komponen konsumsi diperkirakan akan tumbuh menguat di tahun 2019 terutama konsumsi rumah tangga. Dari sisi ekspor diperkirakan akan tumbuh positif disukung oleh perdagangan antar daerah terutama untuk komoditas logam dasar dan kimia serta ekspor produk manufaktur tertentu seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil, serta makanan dan minuman. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan tahun 2018 menyebabkan bias ke bawah ekonomi nasional.

Sementara dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi provinsi banten terutama didorong oleh sector industri pengolahan seiring dengan ekspektasi menguatnya kinerja penjualan dari sisi domestic dan ekspor, di sisi lain sector perdagangan diperkirakan berada dalam tren akselerasi menyusul masih kuatnya konsumsi masyarakat tahun 2019.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan sedikit membaik dari tahun 2019, sehngga Pemerintah Provinsi Banten menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,2%

Tabel 3.4  
Capaian Pertumbuhan Ekonomi 2017, 2018, Prediksi 2019 dan  
Proyeksi Tahun 2020 (persen)

| URAIAN   | 2016 | 2017 | 2018 | PREDIKSI 2019 | TARGET 2020 |
|----------|------|------|------|---------------|-------------|
| Dunia    | n.a. | 3,7  | 3,5  | 3,6*          | n.a.        |
| Nasional |      | 5,07 | 5,17 | 5,3**         | 5,3-5,5     |
| Banten   | 5,28 | 5,73 | 5,81 | 5,6-6,0***    | 6,2         |

\*) Prediksi IMF  
 \*\*) target yang ditetapkan oleh Pusat  
 \*\*\*) target yang ditetapkan Provinsi Banten

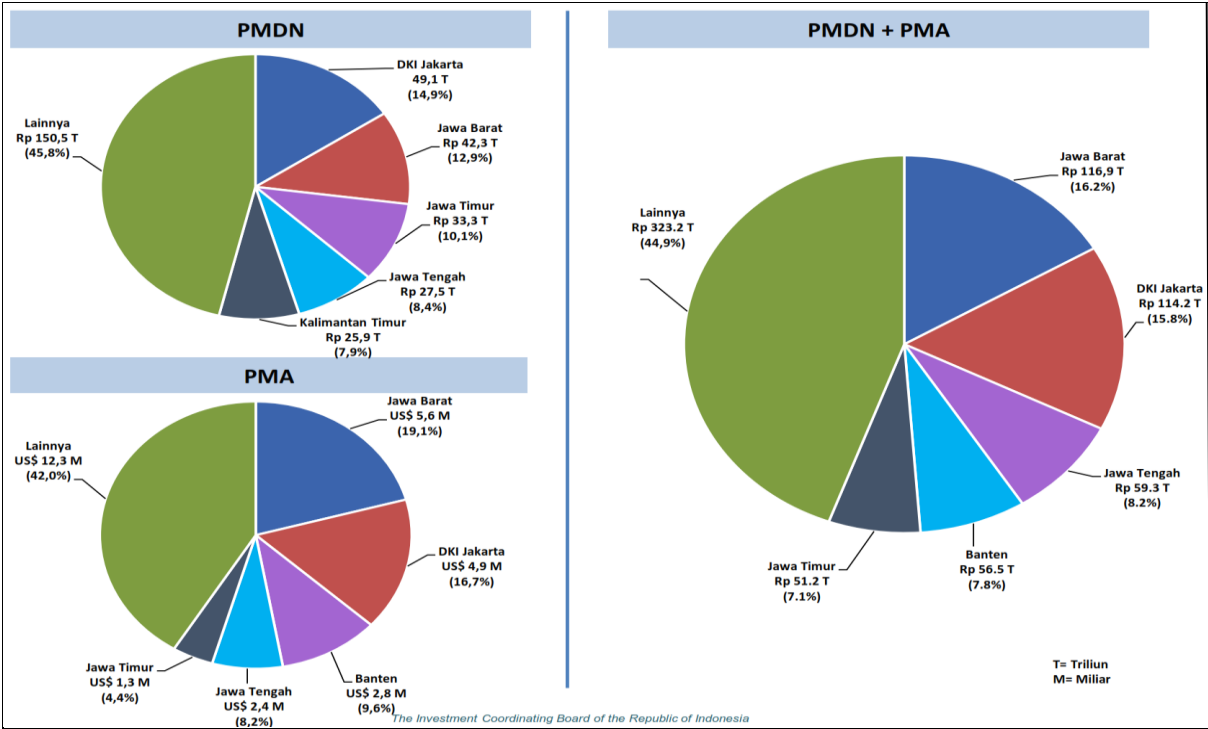
### 3.1.4 Penanaman Modal

Perkembangan perekonomian PMA dan PMDN di Provinsi Tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih sangat menarik bagi Investor. Sektor yang sangat diminati oleh investor yaitu :

- 1) Listrik, gas, dan air sebesar ;
- 2) Transportasi, Pergudangan, dan telekomunikasi;
- 3) Pertambangan;
- 4) Pengolahan makanan; dan

5) Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Gambar 3.7  
Realisasi investasi berdasarkan lokasi Januari – Desember 2018



Sumber: BKPM RI

Tabel 3.5  
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN  
di Provinsi Banten Tahun 2013- 2017

| TAHUN | PMDN   |                              | PMA    |                         |
|-------|--------|------------------------------|--------|-------------------------|
|       | PROYEK | INVESTASI<br>(MILIAR RUPIAH) | PROYEK | INVESTASI<br>(JUTA USD) |
| 2016  | 496    | 12.426,3                     | 2.161  | 2.912,1                 |
| 2017  | 699    | 15.141,9                     | 2.479  | 3.047,5                 |
| 2018  | 718    | 18.637,56                    | 1.895  | 2.827,3                 |

Sumber: BKPM RI

Pada tahun 2018, PMDN Banten masuk peringkat enam setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PMA, Provinsi Banten masuk pada peringkat tiga setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2018, realisasi investasi mencapai Rp 56,5 triliun dengan kurs rupiah 13.400 per USD.

Investasi pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan tetap tumbuh, seiring dengan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur serta perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal. Berkurangnya ketidakpastian global seiring stance the federal reserves Amerika Serikat yang kemungkinan

besar tidak menaikkan suku bunganya pada tahun 2019 diperkirakan akan mendorong minat investor asing untuk berinvestasi di negara-negara emerging markets termasuk Indonesia. Realistis menurunnya ketidakpastian keuangan global serta kondisi ekonomi nasional yang membaik, turut mendorong Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Banten.

Berlanjutnya program perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal atau *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan angka *ease of doing business* diharapkan akan meningkatkan daya Tarik investor asing ke Indonesia. Pada tahun 2018 telah berlangsung pembangunan beberapa proyek besar oleh Pemerintah dan juga sektor swasta di Provinsi Banten. Penataan Kawasan Kesultanan Banten diharapkan akan menambah kontribusi PDRB. Bahkan pada tahun 2019, Proyek strategis Provinsi Banten tahun jamak yaitu pembangunan Sport Center diharapkan dapat memberikan dampak pada Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten, yang puncak pembangunannya akan ada pada tahun 2020 dan 2021. Tren perbaikan investasi pada tahun 2019 diperkirakan akan berlanjut di Tahun 2020.

Terdapat beberapa faktor risiko yang harus diwaspadai dan dapan menahan investasi. Salah satu faktor risiko yang menentukan di pasar keuangan adalah masih adanya kemungkinan dinaikkannya the Fed Fund Rate oleh Federal Reserve Amerika Serikat di 2019. Kebijakan tersebut akan mendorong penguatan dolar AS. Selain itu, Pemilu tahun 2019 menyebabkan beberapa investor menunda investasinya uang posisinya cenderung *wait and see*.

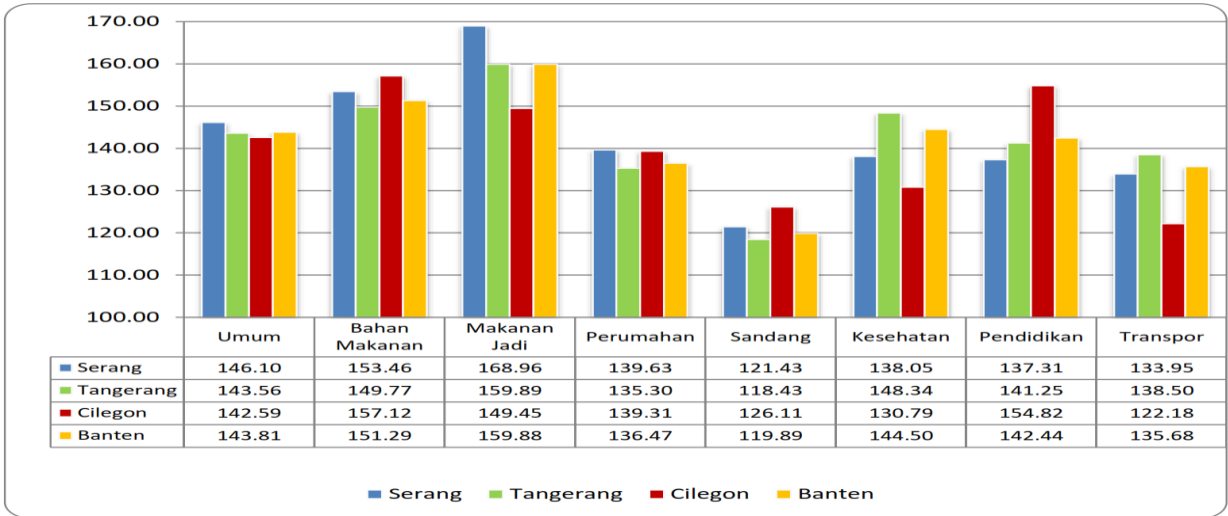
### **3.1.5 Inflasi**

Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,35 persen, sedangkan inflasi “*Year on Year*” (IHK Februari 2019 terhadap Februari 2018) sebesar 3,30 persen. Kemudian inflasi “*Year on Year*” (IHK Maret 2019 terhadap Maret 2018) tercatat sebesar 2,97 persen.

Tabel 3.6  
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten  
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Maret 2019 (2012= 100)

| Kelompok Pengeluaran                          | IHK<br>Maret<br>2018 | IHK<br>Februari<br>2019 | IHK<br>Maret<br>2019 | Inflasi<br>Maret<br>2019 *) | Laju Inflasi<br>Tahun<br>2019 **) | Inflasi<br>"Year on<br>Year"<br>***) |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1)                                           | (2)                  | (3)                     | (4)                  | (5)                         | (6)                               | (7)                                  |
| U M U M                                       | 139,66               | 143,70                  | 143,81               | 0,08                        | 0,43                              | 2,97                                 |
| 1. Bahan Makanan                              | 151,79               | 152,16                  | 151,29               | -0,57                       | -0,74                             | -0,33                                |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau    | 154,71               | 159,28                  | 159,88               | 0,38                        | 1,26                              | 3,34                                 |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar | 131,10               | 136,39                  | 136,47               | 0,06                        | 1,05                              | 4,10                                 |
| 4. Sandang                                    | 115,42               | 119,84                  | 119,89               | 0,04                        | 0,45                              | 3,87                                 |
| 5. Kesehatan                                  | 137,23               | 144,19                  | 144,50               | 0,22                        | 0,27                              | 5,30                                 |
| 6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga          | 136,43               | 142,59                  | 142,44               | -0,11                       | 0,10                              | 4,41                                 |
| 7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan       | 131,25               | 134,90                  | 135,68               | 0,57                        | 0,25                              | 3,37                                 |

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Banten berturut-turut sebagai berikut: kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen, kelompok sandang sebesar 0,00 persen sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar -0,01 persen dan -0,11 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi selama bulan Maret 2019 antara lain bawang merah, tahu mentah, angkutan udara, pizza, bawang putih, bawang, Mujair dan gurame. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga paling banyak antara lain adalah tomat buah, buncis, cabe merah, daging ayam ras, cabe rawit dan kamera.



Sumber: BPS Provinsi Banten

Gambar 3.8  
Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten (2012=100)  
Bulan Februari 2019

Tekanan inflasi Provinsi Banten pada tahun 2020 diperkirakan akan tetap terjaga dan masih berada dalam kategori terkendali. Inflasi yang disebabkan oleh pangan strategis diperkirakan dapat dikendalikan dengan tetap terjaga. Perkembangan beberapa proyek strategis nasional (PSN) di Provinsi Banten seperti jalan tol (Serang-Panimbang, Kunciran-Serpong, Serpog-Cinere, Serpong-Balaraja, dan Cengkareng-Kunciran) yang diperkirakan beroperasi pada tahun 2019 dan 2020, dapat mendorong kelancaran distribusi di Provinsi Banten. Dengan diselesaikannya Bendungan Karian Kabupaten Lebak Tahun 2020 diharapkan dapat membantu irigasi sehingga memungkinkan mendorong ketersediaan pasokan dengan 3 kali masa tanam dalam setahun.

Tabel 3.7  
Perbandingan IHK, Inflasi/Deflasi dan Laju Inflasi 26 Kota Di Pulau Jawa dan Banten Bulan Maret 2019

|     | Kota        | IHK<br>Maret2018 | IHK<br>Maret2018 | IHK<br>Maret2019 | Inflasi<br>Maret 2019<br>*) | Laju Inflasi<br>Tahun<br>Kalender<br>2019 **) | Inflasi Year<br>on Year **) |
|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|     | (1)         | (2)              | (3)              | (4)              | (5)                         | (6)                                           | (7)                         |
| 1.  | Jakarta     | 132,14           | 135,25           | 136,12           | 0,14                        | 0,64                                          | 3,01                        |
| 2.  | Bogor       | 133,48           | 136,73           | 137,09           | 0,28                        | 0,26                                          | 2,70                        |
| 3.  | Sukabumi    | 131,7            | 134,06           | 134,35           | 0,04                        | 0,22                                          | 2,01                        |
| 4.  | Bandung     | 131,24           | 134,48           | 134,53           | 0,03                        | 0,04                                          | 2,51                        |
| 5.  | Cirebon     | 128,11           | 129,98           | 130,27           | 0,18                        | 0,22                                          | 1,69                        |
| 6.  | Bekasi      | 129,57           | 132,13           | 133,26           | 0,01                        | 0,86                                          | 2,85                        |
| 7.  | Depok       | 130,68           | 132,93           | 133,45           | 0,24                        | 0,39                                          | 2,12                        |
| 8.  | Tasikmalaya | 130,96           | 132,23           | 132,67           | 0,03                        | 0,33                                          | 1,31                        |
| 9.  | Cilacap     | 135,58           | 137,73           | 138,27           | 0,32                        | 0,39                                          | 1,98                        |
| 10. | Purwokerto  | 129,19           | 131,87           | 131,99           | 0,19                        | 0,09                                          | 2,17                        |
| 11. | Kudus       | 138,9            | 140,92           | 141,29           | 0,23                        | 0,26                                          | 1,72                        |
| 12. | Surakarta   | 127,76           | 129,30           | 130,05           | 0,29                        | 0,58                                          | 1,79                        |
| 13. | Semarang    | 130,71           | 132,70           | 132,95           | 0,34                        | 0,19                                          | 1,71                        |
| 14. | Tegal       | 128,62           | 131,35           | 131,44           | 0,20                        | 0,07                                          | 2,19                        |
| 15. | Yogyakarta  | 129,23           | 131,81           | 132,60           | 0,26                        | 0,60                                          | 2,61                        |
| 16. | Jember      | 127,72           | 130,62           | 130,53           | -0,06                       | -0,07                                         | 2,20                        |
| 17. | Banyuwangi  | 127,62           | 128,96           | 129,58           | 0,17                        | 0,48                                          | 1,54                        |
| 18. | Sumenep     | 128,12           | 130,78           | 130,62           | -0,07                       | -0,12                                         | 1,95                        |
| 19. | Kediri      | 127,41           | 129,27           | 129,56           | 0,16                        | 0,22                                          | 1,69                        |
| 20. | Malang      | 132,38           | 134,99           | 135,63           | 0,36                        | 0,47                                          | 2,46                        |
| 21. | Probolinggo | 127,59           | 129,77           | 129,59           | -0,12                       | -0,14                                         | 1,57                        |
| 22. | Madiun      | 129,76           | 132,09           | 132,59           | 0,14                        | 0,38                                          | 2,18                        |
| 23. | Surabaya    | 132,35           | 135,24           | 135,73           | 0,15                        | 0,36                                          | 2,55                        |
| 24. | Tangerang   | 139,38           | 143,08           | 143,56           | 0,01                        | 0,34                                          | 3,00                        |
| 25. | Cilegon     | 138,85           | 141,62           | 142,59           | 0,37                        | 0,68                                          | 2,69                        |
| 26. | Serang      | 141,71           | 145,19           | 146,10           | 0,15                        | 0,63                                          | 3,10                        |
| 27. | BANTEN      | 139,66           | 143,70           | 143,81           | 0,08                        | 0,43                                          | 2,97                        |

Tabel 3.8  
Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (%)

| INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 (ANGKA PROYEKSI)* |         |         | 2020 (ANGKA PROYEKSI)* |         |         |
|-----------|------|------|------------------------|---------|---------|------------------------|---------|---------|
|           |      |      | OPTIMIS                | MODERAT | PESIMIS | OPTIMIS                | MODERAT | PESIMIS |
| Nasional  | 3,30 | 3,23 | 2,5 – 4,5              |         |         | 2,0 – 4,0              |         |         |
| Banten    | 3,89 | 3,49 | 3,30                   | 3,50    | 3,7     | 3,20                   | 3,45    | 3,6     |

*Keterangan: Sumber, BPS Provinsi Banten*

*\* adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten*

### 3.1.6 ICOR

#### 3.1.3.1 Nilai ICOR Total

Berdasarkan perhitungan PDRB ADHK 2010 pada Tahun 2018 PDRB Provinsi Banten tercatat sebesar 433,88 Triliun rupiah dengan Pertumbuhan sebesar 5,81 persen dari tahun sebelumnya. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan inventori sebesar Rp 135,30 Triliun sehingga ICOR Provinsi Banten sebesar 5,36. Yang artinya untuk melakukan 1 investasi diperlukan modal sebesar 5,36. Kondisi Ideal yaitu pada ICOR pada skala 2,0 – 3,0. Hal ini juga menggambarkan bahwa Penciptaan Lapangan Kerja di Provinsi Banten masih didominasi oleh Investasi Padat Modal bukan Padat Karya.

### 3.1.7 Ketenagakerjaan

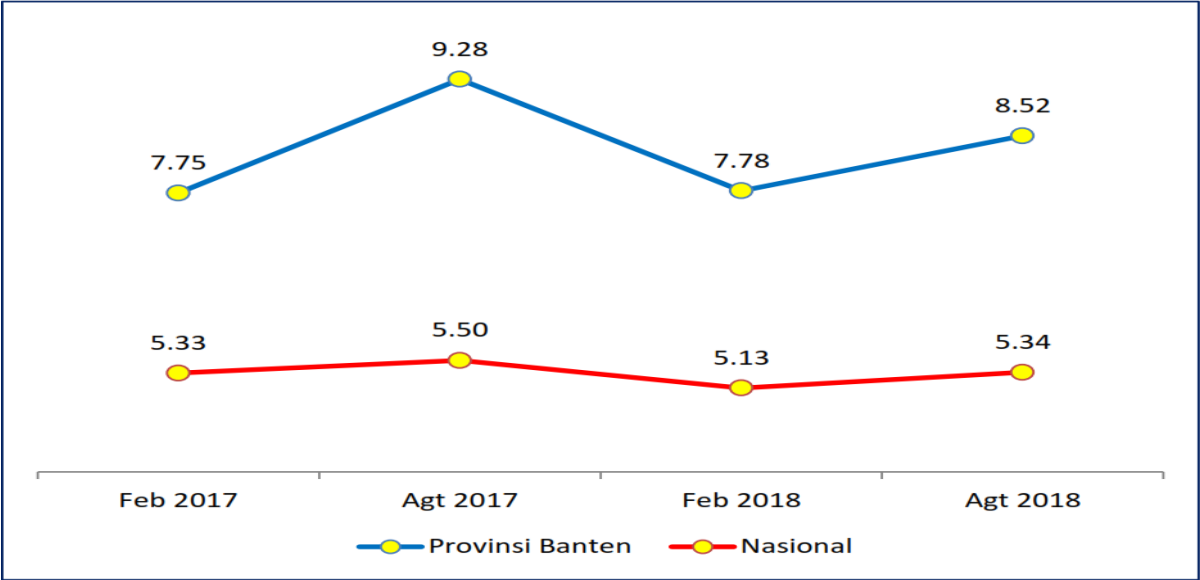
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebesar 5,33 juta orang, naik sekitar 25 ribu pekerja jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017. Pada periode yang sama juga terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 9,28 persen menjadi 8,52 persen. TPT lulusan SMK menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain yaitu 14,23 persen pada Agustus 2018. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Banten adalah sektor industri dan sektor perdagangan, masing-masing sebesar 23,77 persen dan 19,34 persen. Berdasarkan status pekerjaan, sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus buruh/karyawan (2,87 juta orang). Jumlah pekerja formal di Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Persentase pekerja formal relatif tidak mengalami perubahan, dari 56,92 persen pada Agustus 2018.

Tabel 3.9  
 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan  
 Provinsi Banten, Februari 2017 – Agustus 2018

| Jenis Kegiatan Utama                               | 2017     |         | 2018     |         |
|----------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                                                    | Februari | Agustus | Februari | Agustus |
| (1)                                                | (3)      | (4)     | (5)      |         |
| 1. Penduduk 15+ (000)                              | 8.879    | 8.981   | 9.078    | 9.181   |
| 2. Angkatan Kerja                                  | 5.969    | 5.597   | 6.088    | 5.829   |
| Bekerja (000)                                      | 5.507    | 5.077   | 5.615    | 5.332   |
| Penganggur (000)                                   | 462      | 520     | 473      | 497     |
| 3. Bukan Angkatan Kerja (000)                      | 2.909    | 3.384   | 2.990    | 3.351   |
| Sekolah                                            | 731      | 852     | 771      | 875     |
| Mengurus Rumah Tangga                              | 1.845    | 2.133   | 1.914    | 2.098   |
| Lainnya                                            | 333      | 399     | 305      | 378     |
| 4. TPAK (%)                                        | 67,23    | 62,32   | 67,06    | 63,49   |
| 5. TPT (%)                                         | 7,75     | 9,28    | 7,77     | 8,52    |
| 6. Pekerja tidak penuh/Setengah Pengangguran (000) | 1.086    | 864     | 1.306    | 975     |
| Setengah penganggur/SP Terpaksa                    | 317      | 249     | 400      | 225     |
| Paruh waktu/SP Sukarela                            | 769      | 615     | 906      | 749     |

Sumber : BPS Provinsi Banten

Indikator lain adalah jumlah setengah pengangguran atau pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh ialah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (di bawah 35 jam seminggu).



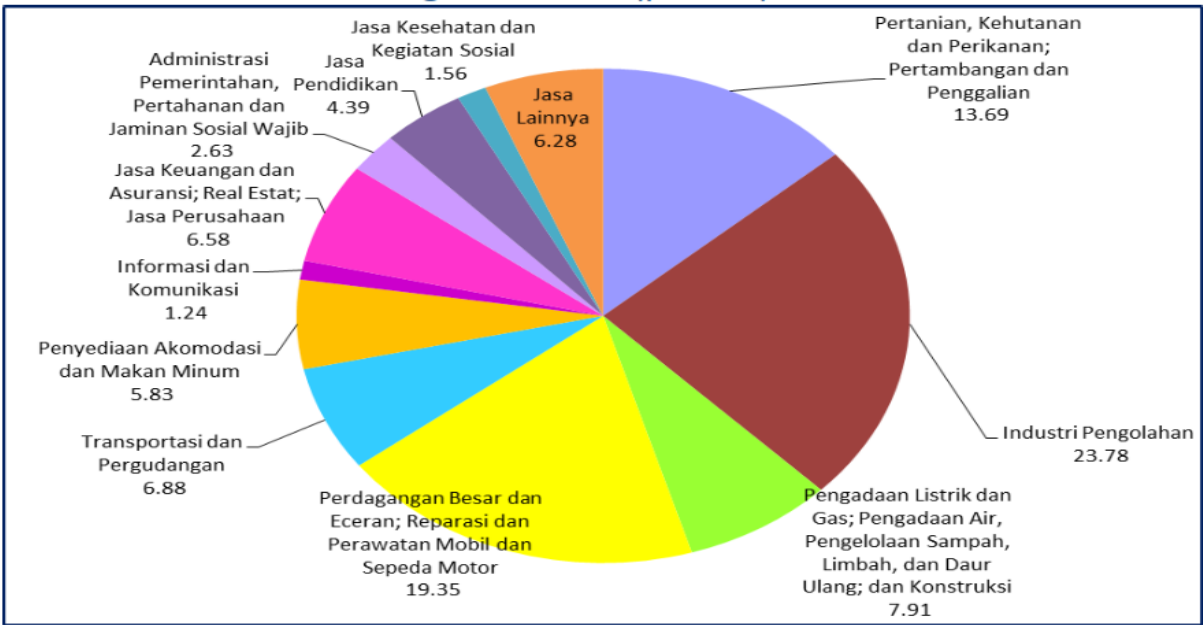
Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 3.9  
 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten dan Nasional, Februari 2016-  
 Agustus 2017 (persen)

Angka pengangguran menunjukkan penurunan dari 9,28 persen pada Agustus 2017 menjadi 8,52 persen pada bulan Agustus 2018. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi

dibanding angka pengangguran nasional. Di Provinsi Banten banyak terdapat lapangan pekerjaan yang menarik migran untuk masuk ke Banten. Banyaknya migran masuk yang mencari pekerjaan ini tidak semuanya terserap oleh pasar kerja sehingga menambah jumlah pengangguran di Banten. Di lain pihak, migran masuk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah memperoleh pekerjaan di Banten. Pada Agustus 2018, angka pengangguran Provinsi Banten menempati peringkat pertama terbesar nasional, dimana angka pengangguran nasional tercatat sebesar 5,34 persen.

Dilihat berdasar tren sektoral, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten terbesar yaitu di sektor Industri (1,21 juta orang) kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (1,09 juta orang).



Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 3.10  
 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Banten, Agustus 2018 (persen)

Sebagian besar penduduk bekerja di Banten berstatus sebagai buruh/karyawan yaitu sebesar 2,87 juta. Jumlah buruh/karyawan dalam satu tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 53 ribu orang. Peningkatan jumlah pekerja terjadi pada semua status pekerjaan kecuali pekerja bebas di pertanian yang turun sebanyak 52 ribu orang. Status pekerjaan utama dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyusun 2 kelompok kegiatan ekonomi yakni formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang berstatus

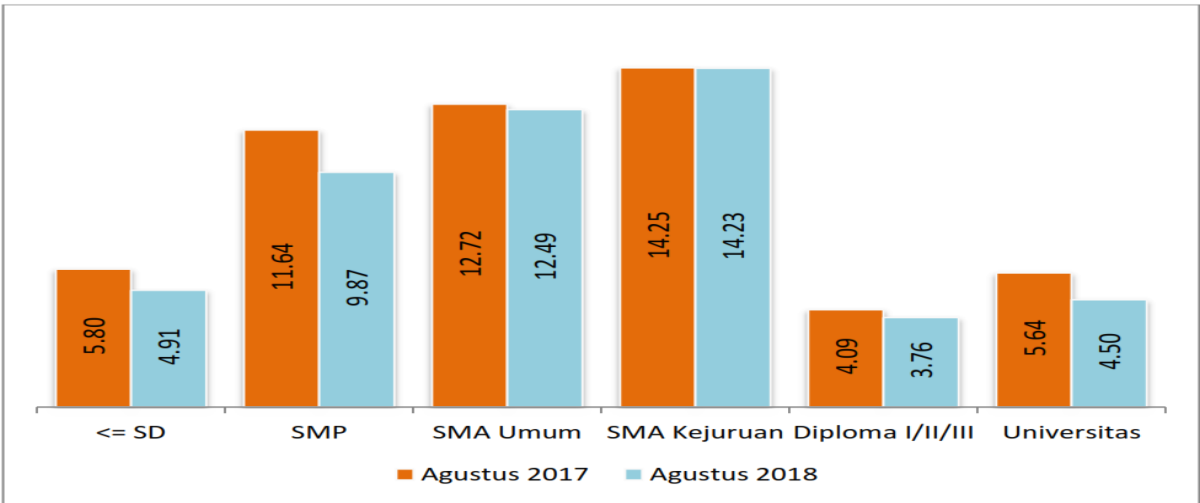
buruh/karyawan. Sementara sisanya digolongkan ke dalam kegiatan informal. Persentase pekerja formal di Provinsi Banten lebih tinggi dibanding pekerja informal. Pada Agustus 2018, pekerja formal tercatat sebanyak 3,34 juta orang atau sebesar 56,92 persen. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 58,07 persen. Dengan kata lain penyerapan tenaga kerja pada periode satu tahun terakhir lebih banyak terjadi pada kegiatan ekonomi informal.

Tabel 3.10  
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2017 - Agustus 2018 (dalam ribuan)

| Status Pekerjaan Utama             | 2017     |         | 2018     |         |
|------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                                    | Februari | Agustus | Februari | Agustus |
| (1)                                | (2)      | (3)     | (4)      | (5)     |
| Berusaha sendiri                   | 874      | 918     | 926      | 1.004   |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap | 608      | 382     | 558      | 478     |
| Berusaha dibantu buruh tetap       | 169      | 136     | 175      | 169     |
| Buruh/Karyawan                     | 2.889    | 2.813   | 2.928    | 2.867   |
| Pekerja bebas                      | 530      | 546     | 531      | 497     |
| Pekerja keluarga/tak dibayar       | 436      | 283     | 497      | 320     |
| Jumlah                             | 5.507    | 5.077   | 5.615    | 5.333   |

Sumber : BPS Provinsi Banten

Dilihat dari komposisi pencari kerja menurut pendidikan, pencari kerja di Provinsi Banten didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Persentase pencari kerja yang berpendidikan rendah (SMP ke bawah) maupun tinggi (diploma dan sarjana) meningkat dibanding tahun lalu. Sementara itu, persentase pengangguran yang mengenyam pendidikan menengah (SMA/SMK) mengalami kenaikan dari 48,17 persen (Agustus 2017) menjadi 52,81 persen (Agustus 2018).



Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 3.11  
Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan  
di Provinsi Banten, Februari 2017 - Agustus 2018 (persen)

Tabel 3. 11  
Realisasi Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Tahun 2018, Prediksi Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020

| INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 5,50 | 5,34 | 4,80 – 5,20               | 4,8 – 5,1                 |
| Banten    | 9,28 | 8,52 | 8,20                      | 8,00                      |

3.1.8 Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2018 sebesar 5,25 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,01poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,24 persen. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74ribu orang pada September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2018 sebesar 4,38 persen turun menjadi 4,24 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerahperdesaanpada Maret 2018 sebesar 7,33 persen naik menjadi 7,67 persen pada September 2018. Selama periode Maret 2018-September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 11,67 ribu orang (dari 393,80 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 382,13 ribu orang pada September 2018), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 19,05 ribu orang (dari 267,55 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 286,60 ribu

orang pada September 2018). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,60 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan September 2018 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, roti serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan September 2018 mencapai 5,25 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin (dari posisi 5,24 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,38 menjadi 4,24 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,33 pada Maret 2018 menjadi 7,67 pada September 2018. Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada bulan September 2018

Tabel 3.12  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  
Maret 2018-September 2018

| Daerah/Tahun                      | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| (1)                               | (2)                           | (3)                        |
| <b><u>Perkotaan</u></b>           |                               |                            |
| Maret 2018                        | 393,80                        | 4,38                       |
| September 2018                    | 382,13                        | 4,24                       |
| <b><u>Perdesaan</u></b>           |                               |                            |
| Maret 2018                        | 267,55                        | 7,33                       |
| September 2018                    | 286,60                        | 7,67                       |
| <b><u>Perkotaan+Perdesaan</u></b> |                               |                            |
| Maret 2018                        | 661,36                        | 5,24                       |
| September 2018                    | 668,74                        | 5,25                       |

Sumber : BPS Provinsi Banten

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2002 - 2018 Secara umum, pada periode 2002–2018 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017 dan September 2018. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Gambar 1 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan September 2018.

Perubahan Garis Kemiskinan September 2018, Garis Kemiskinan di pergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. perkembangan Garis Kemiskinan pada periode Maret-September 2018. Selama periode Maret-September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,42 persen, yaitu dari Rp431.069,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp450.108,- per kapita per bulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada September 2018 adalah sebesar 71,60 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen.

Tabel 3.13  
 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,  
 Maret 2018 - September 2018

| Daerah/Tahun                      | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) |               |         |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|
|                                   | Makanan                          | Bukan Makanan | Total   |
| (1)                               | (2)                              | (3)           | (4)     |
| <b><u>Perkotaan</u></b>           |                                  |               |         |
| Maret 2018                        | 316.089                          | 132.429       | 448.518 |
| September 2018                    | 331.096                          | 137.477       | 468.572 |
| Perubahan (%)                     | 4,75                             | 3,81          | 4,47    |
| <b><u>Perdesaan</u></b>           |                                  |               |         |
| Maret 2018                        | 293.446                          | 96.862        | 390.309 |
| September 2018                    | 301.349                          | 104.616       | 405.965 |
| Perubahan (%)                     | 2,69                             | 8,01          | 4,01    |
| <b><u>Perkotaan+Perdesaan</u></b> |                                  |               |         |
| Maret 2018                        | 308.915                          | 122.153       | 431.069 |
| September 2018                    | 322.256                          | 127.852       | 450.108 |
| Perubahan (%)                     | 4,32                             | 4,67          | 4,42    |

Sumber : BPS Provinsi Banten

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,822 pada Maret 2018 menjadi 0,908 pada September 2018. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,196 menjadi 0,250 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tabel 3.14

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, Maret 2018-September 2018

| Tahun                                   | Kota  | Desa  | Kota + Desa |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|
| (1)                                     | (2)   | (3)   | (4)         |
| <b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)</b> |       |       |             |
| Maret 2018                              | 0,692 | 1,143 | 0,822       |
| September 2018                          | 0,684 | 1,449 | 0,908       |
| <b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)</b> |       |       |             |
| Maret 2018                              | 0,162 | 0,278 | 0,196       |
| September 2018                          | 0,157 | 0,475 | 0,250       |

Dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Provinsi Banten yang *Pro Poor* seperti, Pembangunan Rumah Layak Huni, Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Program Pendidikan Gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKH Negeri serta Pemberian Hibah BOSDA Kepada Sekolah Swasta, Pembiayaan Masyarakat Miskin, Pembangunan Rumah Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Khumuh, dan juga program bantuan social berupa Jamsosratu diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap Pengurangan kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 15  
 Realisasi penurunan Kemiskinan Tahun 2018, Prediksi Tahun 2019, dan  
 Proyeksi Tahun 2020

| INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 9,82 | 9,66 | 8,5 - 9,85                | 8,50 - 9,00               |
| Banten    | 5,24 | 5,25 | 5,00                      | 4,87                      |

### 3.1.9 Indek Gini

Indeks Gini merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks Gini Provinsi Banten pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,367. Angka ini turun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,385. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,362 turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,386. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan justru meningkat dari 0,283 pada Maret 2018 menjadi0,299 pada September 2018. Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,50 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,22 persendan didaerah perdesaan sebesar21,75 Persen.

### 3.1.10 Indeks Pembangunan Manusia

Sebagaimana dipublikasikan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten oleh Bank Indonesia, Periode Februari 2019 bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten secara konsisten mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari IPM Nasional. Namun demikian secara spasial terlihat lebarnya perbedaan antara IPM di Tangerang Raya dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang mencerminkan masih

adanya kesenjangan kualitas hidup masyarakat antara wilayah Banten Utara dengan Banten.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi Pengetahuan dicerminkan oleh indikator Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi Standar Hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 3.16  
 Capaian dan Target Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Banten  
 Tahun 2017-2020

| INDIKATOR | 2017  | 2018  | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 71,06 | 71,30 | n.a.                      | 71,47                     |
| Banten    | 69,49 | 69,64 | 70,06                     | 70,66                     |

Tabel 3.17  
 Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Banten  
 Tahun 2017-2020

| INDIKATOR | 2017  | 2018  | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 12,85 | 13,21 | n.a.                      | 13,41                     |
| Banten    | 12,78 | 12,85 | 13,5                      | 14,0                      |

Tabel 3.18  
 Capaian dan Target Angka Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) Provinsi Banten  
 Tahun 2017-2020

| INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|------|------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 8,10 | 8,30 | 8,8<br>(Target RKP 2019)  | 8,39                      |
| Banten    | 8,53 | 8,62 | 8,7                       | 8,9                       |

Tabel 3.19  
Capaian dan Target Pengeluaran Perk Kapita Provinsi Banten  
Tahun 2017-2020 (ribu rupiah)

| INDIKATOR | 2017   | 2018   | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 10.664 | 11.131 | n.a.                      | 11.283                    |
| Banten    | 11.700 | 12.000 | 12.307                    | 12.610                    |

Pada tahun 2017, IPM Banten telah mencapai 71,42, atau meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,65 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 0,98 persen. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah untuk komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), RLS, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, masing-masing 69,49 tahun, 12,78 tahun, 8,53 tahun, dan 11,7 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (80,84) dan Kabupaten Lebak (62,95)

Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). **Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95**, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Kategori “Tinggi” tersebut, diperoleh Banten sejak tahun 2015. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), sedangkan yang terendah pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH 69.64 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,62 tahun, dan PKP 12,0 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,17) dan Kabupaten Lebak (63,37).

Pencapaian IPM dan salah satu komponen penyusun yaitu Rata-rata Lama Sekolah dapat menjadi gambaran bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah Selatan yang saat ini juga masih menjadi daerah tertinggal

Tabel 3.20  
Capaian dan Target IPM Provinsi Banten Tahun 2017-2020

| INDIKATOR | 2017  | 2018  | 2019<br>(ANGKA PROYEKSI)* | 2020<br>(ANGKA PROYEKSI)* |
|-----------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|
| Nasional  | 70,81 | 71,5  | 71,98                     | 72,51                     |
| Banten    | 71,42 | 71,95 | 72,20                     | 72,80                     |

Dengan memperhatikan Target dan Capaian Makro Ekonomi Secara Nasional dan Capaian Makro Ekonomi Tahun-tahun sebelumnya, serta Berita Acara Rapat Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Daerah antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah Provinsi telah menyepakati Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2020, dengan target sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,20 Persen
2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 8,00 Persen
3. Penurunan Tingkat Kemiskinan 4,87 Persen
4. Indeks Pembangunan Manusia 72,80
5. Indeks Gini Rasio 0,37

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

#### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21  
Realisasi dan Proyeksi Penganggaran Pembangunan

| NO         | URAIAN                                            | P-APBD TA 2017           | P-APBD TA 2018            | APBD TA 2019              | APBD TA 2020              | APBD TA 2021              |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a          | B                                                 | c                        | d                         | e                         | f                         | g                         |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>9.880.132.671.847</b> | <b>10.477.855.594.717</b> | <b>11.831.983.759.800</b> | <b>12.153.470.793.650</b> | <b>12.489.070.103.000</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>5.780.852.942.226</b> | <b>6.296.107.366.717</b>  | <b>7.344.821.272.800</b>  | <b>7.839.778.690.388</b>  | <b>8.054.352.930.000</b>  |
| 4.1.1      | Pajak Daerah                                      | 5.505.571.000.000        | 5.942.765.440.000         | 6.967.729.412.400         | 7.525.148.000.000         | 7.750.902.440.000         |
| 4.1.2      | Retribusi Daerah                                  | 18.599.920.000           | 19.826.483.520            | 18.569.771.200            | 20.700.708.000            | 21.321.720.000            |
| 4.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 52.024.963.416           | 51.614.659.419            | 55.300.000.000            | 51.511.432.000            | 53.056.770.000            |
| 4.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 204.657.058.810          | 281.900.783.778           | 303.222.089.200           | 242.418.550.388           | 229.072.000.000           |
| <b>4.2</b> | <b>Dana Perimbangan</b>                           | <b>4.093.609.729.621</b> | <b>4.176.078.228.000</b>  | <b>4.481.092.487.000</b>  | <b>4.307.492.103.262</b>  | <b>4.428.517.173.000</b>  |
| 4.2.1      | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak      | 716.158.687.621          | 707.384.582.000           | 711.779.997.000           | 650.605.096.612           | 711.779.997.000           |
| 4.2.2      | Dana Alokasi Umum                                 | 1.059.320.237.000        | 1.072.903.468.000         | 1.140.003.353.000         | 1.197.003.520.650         | 1.256.853.696.000         |
| 4.2.3      | Dana Alokasi Khusus                               | 2.318.130.805.000        | 2.395.790.178.000         | 2.629.309.137.000         | 2.459.883.486.000         | 2.459.883.480.000         |
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>       | <b>5.670.000.000</b>     | <b>5.670.000.000</b>      | <b>6.070.000.000</b>      | <b>6.200.000.000</b>      | <b>6.200.000.000</b>      |
| 4.3.1      | Pendapatan Hibah                                  | 5.670.000.000            | 5.670.000.000             | 6.070.000.000             | 6.200.000.000             | 6.200.000.000             |

| NO         | URAIAN                                                                            | P-APBD TA 2017            | P-APBD TA 2018            | APBD TA 2019              | APBD TA 2020              | APBD TA 2021              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                             | <b>10.439.289.543.666</b> | <b>11.055.264.730.612</b> | <b>12.154.531.396.800</b> | <b>12.854.498.603.650</b> | <b>12.952.532.723.000</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                                     | <b>6.867.532.222.470</b>  | <b>6.904.550.820.612</b>  | <b>7.626.033.770.600</b>  | <b>8.227.457.353.650</b>  | <b>8.228.271.783.000</b>  |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                                                                   | 1.727.520.252.113         | 1.849.085.000.000         | 2.218.718.430.000         | 2.488.504.853.650         | 2.595.032.413.000         |
| 5.1.2      | Belanja Hibah                                                                     | 2.211.089.768.000         | 2.132.051.721.820         | 2.310.418.836.000         | 2.280.418.830.000         | 2.280.418.830.000         |
| 5.1.3      | Belanja Bantuan Sosial                                                            | 128.877.500.000           | 69.735.000.000            | 105.979.000.000           | 105.979.000.000           | 105.979.000.000           |
| 5.1.4      | Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota                                          | 2.184.014.250.000         | 2.370.396.604.634         | 2.502.794.028.200         | 2.874.861.200.000         | 2.751.148.070.000         |
| 5.1.5      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik | 577.846.831.718           | 464.093.476.400           | 432.693.476.400           | 432.693.470.000           | 432.693.470.000           |
| 5.1.6      | Belanja Tidak Terduga                                                             | 38.183.620.639            | 19.189.017.758            | 55.430.000.000            | 45.000.000.000            | 63.000.000.000            |
|            |                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Langsung</b>                                                           | <b>3.571.757.321.196</b>  | <b>4.150.713.910.000</b>  | <b>4.528.497.626.200</b>  | <b>4.627.041.250.000</b>  | <b>4.724.260.940.000</b>  |
| 5.2.1      | Belanja Pegawai                                                                   | 217.558.612.000,00        | 266.963.509.100,00        | 55.587.557.000            | 92.280.825.000            | 94.485.218.800            |
| 5.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 1.714.657.065.442         | 2.119.833.963.595         | 2.785.054.925.626         | 2.781.424.750.000         | 2.834.556.564.000         |
| 5.2.3      | Belanja Modal                                                                     | 1.639.541.643.754         | 1.763.916.437.305         | 1.687.855.143.574         | 1.753.335.675.000         | 1.795.219.157.200         |
|            |                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
|            | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                          | <b>(559.156.871.819)</b>  | <b>(577.409.135.895)</b>  | <b>(322.547.637.000)</b>  | <b>(701.027.810.000)</b>  | <b>(463.462.620.000)</b>  |
|            |                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                 | <b>559.156.871.819</b>    | <b>577.409.135.895</b>    | <b>322.547.637.000</b>    | <b>701.027.810.000</b>    | <b>463.462.620.000</b>    |
|            |                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                                      | <b>559.156.871.819</b>    | <b>752.409.135.895</b>    | <b>453.547.637.000</b>    | <b>751.027.810.000</b>    | <b>563.462.620.000</b>    |
| 6.1.1      | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya                                                   | 559.156.871.819           | 752.409.135.895           | 453.547.637.000           | 751.027.810.000           | 563.462.620.000           |
|            |                                                                                   |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                                     | <b>-</b>                  | <b>175.000.000.000</b>    | <b>131.000.000.000</b>    | <b>50.000.000.000</b>     | <b>100.000.000.000</b>    |
| 6.2.1      | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                                |                           | 175.000.000.000           | 131.000.000.000           | 50.000.000.000            | 100.000.000.000           |
| <b>7</b>   | <b>SILPA Tahun Anggaran Berkenaan</b>                                             | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu untuk menyederhanakan prosedur; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata; 3) Penyesuaian Tarif Pajak Tarik Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi dan pemberlakuan tariff pajak progresif; Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, pendataan potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, penyesuaian pajak progresif, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah, mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam dan lain- lain.

Pendapatan Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp12.153.470.793.650,00. Rincian Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp 7.839.778.690.388,00 terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp 7.525.148.000.000,00 yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
  - b. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp20.700.708.000,00 yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp51.511.432.000,00 yang terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp242.418.550.388,00 yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, BULD dan Lain-lain.
2. Dana Perimbangan, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 4.307.492.103.262,00 terdiri atas :
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp650.605.096.612,00. Merupakan bagian dana perimbangan untuk

mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp1.197.003.520.650,00. Merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp2.459.883.486.000,00.
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp6.200.000.000,00 yang bersumber dari pendapatan hibah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2020 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan PAD dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan tersebut dibuat untuk:

- 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;

- 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dan dijadikan andalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
- 2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan, razia pajak daerah, dan penagihan pajak langsung pada masyarakat wajib pajak;
- 5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;
- 6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru;
- 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak daerah;
- 9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.
- 10) Melihat kecenderungan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang statis, salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018, yang telah dirintis sejak Tahun 2015 adalah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada OPD serta Unit-unit Pelayanan Teknis yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan daya saing untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat berdasarkan prinsip efisiensi dan

produktivitas, dimana pendapatan BLUD memungkinkan untuk langsung digunakan kembali membiayai pelayanan, langkah ini juga dapat memperluas potensi penerimaan retribusi daerah.

b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK baik itu DAK fisik dan Non Fisik. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Struktur belanja daerah dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp 12.854.498.603.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Tidak langsung

Belanja Tidak langsung pada Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp8.227.457.353.650,00. Penganggaran Belanja Tidak langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan

perundang- undangan. Belanja Pegawai tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.488.504.853.650,00;

- 2) Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp2.280.418.830.000 digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal, pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas- tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Perlu juga diinformasikan bahwa besarnya belanja hibah pada pemerintah provinsi banten lebih didominasi oleh Belanja Hibah Dana BOS untuk Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah;
- 3) Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan sebesar Rp 105.979.000.000,00 digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatas;
- 4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp2.874.861.200.000,00 Penganggarannya berpedoman pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun 2019, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2019 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota akan ditampung dalam P-APBD Tahun 2020;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp432.693.470.000,00 difokuskan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun bantuan keuangan

husus ke Pemerintah Kabupaten/ Kota di fokuskan untuk membiayai urusan wajib pelayanan dasar. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 6) Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp45.000.000.000,00 ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kebencanaan.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.4.627.041.250.000,00 Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Berdasarkan jenis belanja, Belanja Langsung diklasifikasikan kedalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Penetapan Jenis Belanja pada Belanja Langsung TA 2020 dapat ditentukan besarnya secara pasti setelah APBD ditetapkan yang didasarkan pada standar satuan harga yang berlaku pada TA 2020. Dengan pendekatan perhitungan pada TA sebelumnya, komposisi belanja langsung diproyeksikan dengan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai, sebesar Rp 92.280.825.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp 2.781.424.750.000;
- 3) Belanja Modal, sebesar Rp 1.753.335.675.000,00.

Pengelolaan APBD harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan azas sebagai berikut :

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;

2) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;

3) Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerja pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan (input), keluaran (output) dan fungsi output (outcome);

4) Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan

infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit ataupun surplus anggaran. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan struktur anggaran dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

Pada Struktur RAPBD TA 2020 mengalami defisit sebesar Rp 701.027.810.000,00. Jumlah tersebut akan ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA TA anggaran sebelumnya sebesar Rp.751.027.810.000,00. Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan dianggaran sebesar Rp50.000.000.000,00, untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.